



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2014

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronik Untuk Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen dan/atau produk elektronik.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronik yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang dan/atau bahan baku untuk diolah, guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronik oleh Perusahaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp12.845.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika oleh industri pembuatan komponen dan/atau produk elektronika.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2014" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 811

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.011/2014
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2014

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene copolymer</i>	dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
2.	<i>High Impact Polystyrene (HiPs)</i>	dalam bentuk butiran	3903.19.21.00
	<i>High Impact Polystyrene (HiPs)</i>	dalam bentuk selain butiran	3903.19.91.00
3.	<i>Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)</i>	dalam bentuk butiran	3903.30.60.00
4.	<i>Polypropylene sheet</i>	jenis kopolimer dalam lembaran	3920.20.90.00
5.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) sheet</i>	mengandung bahan plastisitas tidak kurang dari 6%	3920.43.00.00
	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) sheet</i>	mengandung bahan plastisitas < 6%	3920.49.00.00
6.	PVF/TPT/TPE film	0,2 mm < tebal < 0,5 mm, 500 mm < lebar < 1.010 mm	3920.99.90.00
7.	<i>Ethylene Vinyl Acetate (EVA) sheet</i>	0,2 mm < tebal < 0,6 mm, 500 mm < lebar < 1.010 mm	3921.90.90.00
8.	<i>Plastic grille</i>	<i>speaker grille</i>	3926.90.59.00
9.	<i>Woven fabric for cloth material of spider</i>	kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $\leq 100 \text{ gr/m}^2$	5208.11.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, tidak dikelantang dan berat $> 100 \text{ gr/m}^2$	5208.12.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas $\geq 85\%$, dikelantang dan berat $\leq 100 \text{ gr/m}^2$	5208.21.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		kain tenunan polos mengandung kapas \geq 85%, dikelantang dan berat $>$ 100 gr/m ²	5208.22.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas \geq 85%, tidak dikelantang dan berat $>$ 200 gr/m ²	5209.11.00.00
		kain tenunan polos mengandung kapas $<$ 85%, tidak dikelantang dan berat $<$ 200 gr/m ²	5210.11.00.00
		kain tenunan stapel sintetik poliester \geq 85%, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.11.00.00
		kain tenunan serat stapel sintetik \geq 85%, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85% atau lebih menurut beratnya, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.21.00.00
		kain tenunan serat stapel sintetik \geq 85%, mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik kurang dari 85%, tidak dikelantang atau dikelantang	5512.91.00.00
		kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² , tidak dikelantang atau dikelantang, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.11.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat ≤ 170 gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5513.12.00.00
		kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat ≤ 170 gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang	5513.13.00.00
		kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² , dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos	5513.21.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang	5514.11.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.12.00.00
		kain tenunan polos lainnya dari serat stapel sintetik < 85% dan berat > 170 gr/m ² , tidak dikentang atau dikelantang	5514.19.00.00
		kain tenunan polos dari serat stapel sintetik poliester < 85% dan berat > 170 gr/m ² , dicelup, kepar 3 benang atau 4 benang termasuk kepar silang	5514.22.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik	5515.99.90.00
10.	<i>Cloth and coated cloth material for edge cone</i>	kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan poliuretan	5903.20.00.00
		kain tekstil dilaminasi/dilapisi/ditutupi dengan plastik, selain plastik dari jenis poliuretan dan PVC	5903.90.00.90
11.	<i>Speaker cloth</i>	kain rajutan atau kaitan lainnya, dari wol atau bulu hewan halus	6006.10.00.00
12.	Bitumen	untuk speaker dalam bentuk lembaran	6807.90.90.00
13.	<i>Low iron tempered glass</i>	-----	7007.19.90.00
14.	<i>Hot rolled steel sheet in coil</i>	4,75 mm ≤ tebal ≤ 10 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.37.00.00
		3 mm ≤ tebal < 4,75 mm, lebar ≥ 600 mm	7208.38.00.00
15.	<i>Cold rolled steel sheet in coil</i>	1,0 mm < tebal < 3 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.16.00.10
		1,0 mm < tebal < 3 mm, lebar > 1.250 mm	7209.16.00.90
		0,5 mm ≤ tebal ≤ 1,0 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.17.00.10
		0,5 mm ≤ tebal ≤ 1,0 mm, lebar > 1.250 mm	7209.17.00.90
		0,17 mm ≤ tebal < 0,5 mm, 600 mm ≤ lebar ≤ 1.250 mm	7209.18.99.00
16.	<i>Galvanized steel sheet in coil</i>	tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11.00
		tebal tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00
		tebal melebihi 1,2 mm	7210.49.13.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Pre-coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	tebal \leq 1,50 mm, lebar \geq 600 mm	7210.70.10.00
18.	<i>Pre-coated Color Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	tebal $<$ 1,5 mm, lebar $<$ 600 mm	7212.40.20.00
19.	<i>Metal mesh material</i>	<i>Perforated metal mesh</i> , tidak dilapisi atau tidak disepuh	7314.49.00.00
20.	<i>Screw</i>	dari besi atau baja	7318.15.00.00
21.	<i>Nut</i>	dari besi atau baja	7318.16.00.00
22.	<i>Tinned copper foil</i>	0,003 mm $<$ tebal $<$ 0,007 mm, 0,05 mm $<$ lebar $<$ 0,25 mm	7410.12.00.00
23.	<i>Transformator</i>	<i>toroidal power transformer</i> , untuk <i>loudspeaker</i> , tidak lebih dari 1 kVA	8504.31.99.90
24.	<i>Single board MP3 module</i>	<i>MP3 player module without radio receiver</i>	8519.81.99.00
	<i>Single board MP3 module</i>	<i>MP3 player module with radio receiver</i>	8527.13.90.00
25.	<i>Junction box</i>	untuk panel modul 50 WP s.d. 260 WP	8536.90.29.00
26.	<i>Copper wire</i>	kawat gulung dari tembaga dilak/dienamel dengan ukuran 0,07 mm \leq diameter \leq 0,6 mm	8544.11.10.00
27.	<i>Cable</i>	digunakan untuk telekomunikasi, dalam gulungan dengan 80 V $<$ voltase \leq 1.000 V	8544.49.39.00
28.	<i>Evaluator</i>	perangkat sistem yang bekerja sama dengan <i>wheel detector</i> untuk menghitung jumlah roda dan menentukan masuk atau keluar roda pada batas <i>track section</i>	8608.00.20.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>Wheel detector</i>	perangkat sistem yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca dan mendeteksi roda kereta dan arah pergerakannya, dengan metode elektromagnetik	8608.00.20.00
30.	<i>Point machine</i>	mesin penggerak <i>wessel</i> menggunakan motor listrik untuk mendorong dan menarik stang penggerak (<i>driving rod</i>)	8608.00.20.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

